



BAB I PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Permasalahan Kesejahteraan Sosial yang semakin kompleks menuntut kita untuk lebih jeli dalam menganalisa setiap permasalahan yang timbul agar pembinaan melalui pelayanan UKS (Usaha Kesejahteraan Sosial) dapat memberikan Alternatif bagi perubahan sikap kepada kemandirian khususnya bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang menjadi sasaran pelayanan usaha kesejahteraan sosial.

Keterbatasan Pemerintah telah merubah paradigma pembangunan kesejahteraan sosial dimana masyarakat lebih lanjut dituntut sebagai mitra pendamping percepatan pembangunan khususnya dibidang kesejahteraan sosial, alternative tersebut merupakan langkah yang penting dan tepat pada kondisi saat ini dengan peran aktif dari Pekerja Sosial Masyarakat (PSM) sebagai pendamping dalam pembangunan Kesejahteraan Sosial melalui upaya pemberdayaan PMKS. Dalam bentuk pembinaan di panti-panti sosial maupun pengembangan usaha ekonomi produktif dengan sentra-sentra kerja yang dikenal dengan Kelompok Usaha Bersama (KUBE), upaya tersebut telah memberikan dampak yang sangat besar terutama bagi percepatan pengembangan kemandirian PMKS.

Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin melalui Rencana Kerja Pembangunan Kesejahteraan Sosial telah menetapkan program tahapan jangka pendek tahunan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan kondisi dan permasalahan yang ada, yaitu melalui pemberdayaan dengan sasaran masyarakat miskin (PMKS) diharapkan selain dapat mengurangi permasalahan dan juga mengentaskan mereka kepada kehidupan yang lebih layak.

1.2. LANDASAN HUKUM

1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2002 Tentang Pembentukan Kabupaten Banyuasin Provinsi Sumatera Selatan (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181);



RENCANA KERJA

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4400);
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 2125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Pengembangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4433);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2009-2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 27);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2006—2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2011 Nomor 26);
12. Peraturan Bupati Nomor 269 Tahun 2012 Tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin;
13. Peraturan Bupati Banyuasin Nomor 409 Tahun 2012 Tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Banyuasin Tahun 2013.



RENCANA KERJA

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

MAKSUD

Dengan adanya kegiatan-kegiatan yang dianggarkan pada tahun 2016 diharapkan mampu memenuhi semua aspirasi masyarakat dalam rangka :

1. Meningkatkan aksesibilitas terhadap pelayanan sosial;
2. Meningkatkan ketahanan sosial masyarakat dalam mencegah dan menangani masalah kesejahteraan sosial;
3. Meningkatkan kualitas manajemen pelayanan kesejahteraan sosial.

TUJUAN

Peningkatan Kesejahteraan Sosial Masyarakat Kabupaten Banyuasin melalui kegiatan-kegiatan yang menyentuh langsung kepada masyarakat diharapkan dapat mewujudkan tujuan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin yaitu :

1. Terwujudnya kesempatan upaya penanggulangan kemiskinan secara terpadu serta berkurangnya beban masyarakat miskin.
2. Terciptanya kondisi penyandang masalah sosial yang sejahtera dan mandiri.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

SISTEMATIKA PENULISAN RENJA – SKPD

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan



RENCANA KERJA

- BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU**
- 2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra SKPD
 - 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi SKPD
 - 2.4 Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
 - 2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat
- BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**
- 3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
 - 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
 - 3.3 Program dan Kegiatan
- BAB IV PENUTUP**
- 4.1 Catatan Penting yang Perlu Mendapat Perhatian
 - 4.2 Kaidah Pelaksanaan
 - 4.3 Rencana Tindak Lanjut
- LAMPIRAN-LAMPIRAN**
- 1. Tabel Daftar Pencapaian Kinerja Pelayanan SKPD
 - 2. Tabel Review Terhadap Rancangan Awal SKPD
 - 3. Tabel Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD
 - 4. Daftar Kegiatan Lintas SKPD dan Lintas Wilayah
 - 5. Tabel Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD



RENCANA KERJA

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU DAN CAPAIAN RENSTRA SKPD

Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin merupakan penjabaran Rencana Pembangunan untuk jangka waktu 1 tahun. Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan-kegiatan dan program-program yang telah disusun dapat dilihat dari LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah). Akuntabilitas merupakan suatu bentuk perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi dari organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui suatu media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja (RENJA) Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin menyajikan dasar Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin selama tahun 2015 dan perkiraan target tahun 2016. Pengukuran Kinerja Kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja

Penetapan Indikator Kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (Input), keluaran (output), hasil (outcome). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan-laporan dan indikator lainnya. Penetapan Indikator Kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.



RENCANA KERJA

B. Capaian Analisis Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja

EVALUASI PROGRAM TAHUN 2015

Anggaran Tahun 2015 Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin sebesar **Rp. 4.372.225.103,-** dengan 8 program dan 42 kegiatan. Dari jumlah dana tersebut terealisasi sebesar **Rp. 4.194.289.734,-** dengan capaian kinerja fisik sebesar 100% dan capaian kinerja keuangan sebesar 95,93%.

PERKIRAAN PENCAPAIAN TAHUN ANGGARAN 2015

Untuk tahun berjalan yaitu Anggaran Tahun 2015 dengan anggaran sebesar **Rp. 4.954.800.000,-** dengan 7 program dan 42 kegiatan yang diharapkan mencapai keberhasilan kinerja sebesar 100% atau minimal sama dengan tahun 2015, baik realisasi fisik maupun keuangan.

Apabila dikaitkan dengan pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Banyuasin, pada dasarnya kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin adalah **"TERWUJUDNYA KESEJAHTERAAN SOSIAL"** untuk dan oleh semua warga masyarakat melalui peran aktif dalam pembangunan daerah Kabupaten Banyuasin. Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan yang telah dilaksanakan pada tahun 2015 dapat dikemukakan beberapa permasalahan dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin sebagai berikut:

- a. Belum optimalnya kemampuan sumber daya manusia yang ada.
- b. Belum dipahaminya secara utuh tentang outcome yang ingin dicapai dari setiap kegiatan, sehingga masih adanya kesulitan merealisasikan sasaran program menjadi outcome kegiatan yang menunjang efektivitas program/kegiatan.
- c. Perlunya peningkatan komitmen dan pemahaman untuk mempedomani indikasi kegiatan dalam Renstra, RKPD maupun dalam RPJMD dalam merencanakan kegiatan.



RENCANA KERJA

Dari identifikasi terhadap permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan urusan sosial, maka peningkatan kinerja organisasi melalui kegiatan tahunan yang dilaksanakannya menjadi hal yang mutlak dilakukan secara sistematis dan terstruktur.

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN SKPD

Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Sosial mempunyai tugas melakukan urusan Pemerintah Kabupaten di bidang sosial berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Dinas Sosial Kabupaten Banyuwangi mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan kegiatan Sekretariat, yaitu urusan umum, perlengkapan, kepegawaian, keuangan, penyusunan program, evaluasi dan pelaporan;
- b. Perencanaan untuk mempersiapkan, mengelola, menelaah penyusunan rumusan kebijakan teknis serta program kerja;
- c. Pengelolaan data dan pelaksanaan pembinaan pembangunan sosial;
- d. Pemberian dukungan kelancaran pelaksanaan pembangunan bidang Sosial yang meliputi:
 1. Menanggulangi/menangani masalah sosial lainnya yang timbul dan berkembang di lingkungan masyarakat.
 2. Membina, mengembangkan potensi dan sumber sosial.
- e. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

SUSUNAN ORGANISASI DINAS SOSIAL KABUPATEN BANYUASIN TERDIRI DARI :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Penyusunan Program, Perencanaan dan Pelaporan.



RENCANA KERJA

- c. Bidang Pemberdayaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Kesejahteraan Sosial Keluarga dan Masyarakat;
 2. Seksi Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil;
 3. Seksi Pemberdayaan Fakir Miskin.
- d. Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat, terdiri dari :
 1. Seksi Rehabilitasi Tuna Sosial dan Korban Napza;
 2. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Penyandang Cacat;
 3. Seksi Pelayanan dan Perlindungan Anak dan Lansia.
- e. Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana;
 2. Seksi Bantuan Sosial Tindak Kekerasan dan Pekerja Migran;
 3. Seksi Pendayagunaan Sumber Dana dan Jaminan Sosial.
- f. Bidang Pembinaan Kelembagaan Sosial, terdiri dari :
 1. Seksi Penyuluhan, Kepahlawanan dan Kesetiakawanan Sosial;
 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat;
 3. Seksi Pembinaan Partisipasi Sosial Masyarakat.
- g. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Tata Usaha;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

2.3 ISU - ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI SKPD

1. Meningkatkan pelaksanaan program-program pelayanan dan rehabilitasi sosial dan memulihkan fungsi sosial bagi penyandang cacat, tuna susila, korban penyalahgunaan napza serta memberikan pelayanan sosial bagi lanjut usia dan anak terlantar untuk kelangsungan hidup dan tumbuh kembangnya.
2. Meningkatkan pelaksanaan program-program pembangunan dalam memberdayakan keluarga fakir miskin, KAT, keluarga dan perempuan rawan sosial ekonomi.
3. Meningkatkan kualitas manajemen dan profesionalisme lembaga pelayanan sosial, peningkatan kualitas sarana prasarana pelayanan sosial, peningkatan



RENCANA KERJA

kemampuan sumber daya manusia dan kompetensi pekerja sosial dan tenaga kesejahteraan sosial masyarakat.

4. Memberikan bantuan kebutuhan dasar kepada korban bencana alam dan sosial, memulihkan fungsi sosial korban bencana, pekerja migran dan korban tindak kekerasan serta pengumpulan dan pengelolaan sumber dana sosial.
5. Meningkatkan sumber daya aparatur dengan mengikuti Diklat Teknis sebagai pendorong pelaksanaan tugas-tugas pembangunan.

2.4 REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL SKPD

Perbandingan review anggaran tahun sebelumnya mengalami kenaikan sehingga mengalami peningkatan dalam rangka mengoptimalkan dan meminimalisasikan pengeluaran belanja daerah dalam alokasi dana APBD Kabupaten Banyuasin, maka yang dilakukan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dalam tahun 2016 adalah menentukan skala prioritas atau peringkat program dan kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu.

Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin pada tahun 2017 yang direncanakan berkisar Rp. 9.415.754.400,- untuk program dan kegiatan yang telah disusun berdasarkan skala prioritas ternyata dibandingkan dengan tahun 2016 mengalami peningkatan sebesar 30 % yang sudah termasuk Belanja Tidak langsung dan Belanja Langsung.

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Untuk mendukung kondisi yang diinginkan sangatlah diperlukan kemampuan dari sumber daya manusia yang ada sehingga dapat mendorong berkembangnya aspirasi masyarakat dan mengusulkannya dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang memang benar-benar dibutuhkan untuk membawa kearah yang lebih baik lagi.

Kondisi tersebut diatas sangat erat kaitannya dengan keberadaan institusi dalam hal ini Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin yang merupakan unsur pelaksana otonomi daerah yang membantu Bupati Banyuasin dibidang Sosial sesuai dengan urusan Pemerintahan Kabupaten serta Perundang-undangan yang berlaku.



RENCANA KERJA

BAB III

TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 TELAAHAN TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Program kerja dapat diartikan sebagai suatu rencana kegiatan dari suatu organisasi yang terarah, terpadu dan tersistematis yang dibuat untuk rentang waktu yang telah ditentukan oleh suatu organisasi. Program kerja ini akan menjadi pedoman bagi organisasi dalam menjalankan kegiatan organisasi juga sebagai sarana untuk mewujudkan cita-cita dari organisasi.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA SKPD

Tujuan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin adalah :

- a. Memberikan gambaran tentang rumusan sasaran, program dan langkah-langkah kegiatan dengan mempertimbangkan potensi, peluang, kendala dan ancaman yang mungkin akan timbul dalam pencapaian keberhasilan program sosial.
- b. Memberikan pedoman bagi semua jajaran pelaksana program pembangunan bidang sosial dilingkungan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin oleh berbagai pihak terkait.

Sasaran Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin adalah agar sasaran pembangunan nasional sektor sosial menjadi lebih praktis dan tergambar serta dapat dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan program tahunan dan menengah dalam rangka untuk mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan sesuai dengan situasi dan kondisi yang berlaku khususnya dibidang pembangunan sosial.

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Program dan kegiatan merupakan penjabaran kebijakan sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran. Adapun rencana kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin Tahun 2017 adalah sebagai berikut :



RENCANA KERJA

PROGRAM	KEGIATAN	
Pelayanan Administrasi Perkantoran	1	Penyediaan Surat Menyurat
	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air, Dan Listrik
	3	Penyediaan Jasa Jaminan Barang Milik Negara
	4	Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas / Operasional
	5	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan
	6	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor
	7	Penyediaan Alat Tulis Kantor
	8	Penyediaan Barang Cetak dan Pengadaan
	9	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
	10	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
	11	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan
	12	Penyediaan Makanan dan Minuman
	13	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	14	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah
	15	Penyediaan Jasa Pendukung Asministrasi Perkantoran / Jasa Teknis
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1	Pembangunan Gedung Kantor
	2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor
	3	Pengadaan Mobeluer
	4	Pemeliharaan Rutin / Berkala Mobil Jabatan
	5	Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas/Operasional
	6	Pemeliharaan Rutin / Berkala Perlengkapan Gedung Kantor



RENCANA KERJA

	7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Makam Pahlawan
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
	2	Penyusunan AKIP SKPD
	3	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan
	4	Pengendalian Verifikasi Sosial Kecamatan

Program		KEGIATAN
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya	1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Usaha Bagi Keluarga Miskin
	2	Pendataan dan Pembinaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) Kabupaten Banyuasin
	3	Bimbingan Teknis Pengurus KUBE
	4	Lomba KUBE Berprestasi
Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	1	Pelatihan Keterampilan dan Praktek Belajar Kerja Bagi Anak Terlantar Termasuk Anak Jalanan Termasuk Anak Jalanan, Anak Cacat, Anak Nakal
	2	Peningkatan Kualitas Pelayanan, Sarana dan Prasarana Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial Bagi PMKS
	3	Pembinaan Panti Sosial
	4	Pengendalian Pelaksanaan RASKIN
	5	Penanganan Orang Terganggu Mental dan Gepeng
	6	Pelaksanaan Sosialisasi Penyandang Cacat Berat Bagi Perangkat Desa Di Kabupaten Banyuasin
	7	Pengendalian Pelaksanaan Program Keresasian Sosial
	8	Pembinaan Kafe dan Salon
	9	Pelaksanaan KIE Penyuluhan HIV/AIDS
	10	Monitoring dan Evaluasi Raskin
	11	Bantuan Kesejahteraan Lansia
	12	Pemberdayaan Ekonomi Tindak Kekerasan dan Pekerja



RENCANA KERJA

		Migran
	13	Monitoring Dalam Rangka Penyediaan Asuransi Kesejahteraan Sosial
	14	Monev Disabilitas Orang Dengan Lanjut Usia di Kabupaten Banyuasin
	15	Monev Disabilitas Orang Dengan Kecacatan Berat (ODK) di Kabupaten Banyuasin
	16	Diklat ODK
	17	Pengadaan Alat-alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat
	18	Pendataan Data Penyandang Disabilitas Orang Dengan Lanjut Usia
	19	Pelaksanaan Kegiatan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Keluarga (LK3) Mandiri
	20	Pendataan dan Pengolahan Data PMKS
	21	Pengendalian Verifikasi Sosial Kemasyarakatan
	22	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Petugas Sosial Kecamatan
	23	Pengadaan Alat Kesehatan Bagi Penyandang Cacat
	24	Pendataan data Penyandang Disabilitas Orang dengan Kecacatan (ODK)
	25	Pembinaan dan Bimbingan Teknis Petugas Sosial Kecamatan
Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1	Peningkatan Kualitas SDM Kesejahteraan Sosial
	2	Pembinaan Nilai-Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan
	3	Pengendalian Pelaksanaan Program Keluarga Harapan
	4	Penyediaan Buffer Stock Untuk Korban Bencana Alam
	5	Pembinaan Karang Taruna dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)
	6	Pelaksanaan Seleksi Karang taruna dan PSM
	7	Pemberdayaan Organisasi Sosial Amal Kematian Bagi Masyarakat
	8	Pelaksanaan Musi Tribotton
	7	Sosialisasi Pemahaman Nilai- Nilai Kepahlawanan dan Kejuangan



RENCANA KERJA

BAB IV

PENUTUP

4.1 CATATAN PENTING YANG PERLU MENDAPAT PERHATIAN

Secara umum program dalam melaksanakan kegiatan Dinas Sosial masih dihadapkan pada masalah antara lain :

- a. Masih kurangnya sumber daya manusia dalam melaksanakan program dan kegiatan pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin.
- b. Masih banyaknya Rumah Tangga Sangat Miskin yang tidak terdaftar dalam validitas data.
- c. Masih banyak Penyandang Cacat yang belum mendapat bantuan.

4.2 KAJIDAH PELAKSANAAN

Pemecahan masalah yang telah dilaksanakan Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin dalam mensukseskan program kegiatan, terdiri dari :

- a. Telah diikutinya Diklat Teknis oleh pegawai dan staf pada Dinas Sosial Kabupaten Banyuasin.
- b. Validasi data oleh Pendamping Program Keluarga Harapan (PKH).

4.3 RENCANA TINDAK LANJUT

- a. Perlu adanya pendataan ulang oleh pihak Badan Pusat Statistik (BPS) untuk calon peserta Program Keluarga Harapan (PKH) di periode berikutnya.
- b. Perlu adanya Pendidikan dan Pelatihan bagi Penyandang Cacat dan Eks Trauma.
- c. Perlu adanya Pelayanan Psikososial bagi PMKS di Trauma Center termasuk bagi Korban Bencana.